

Political Strategy of Women's Identity in 2019 Legislative Election (Study on Ade Kartika Victory in Election District II of Majalengka District)



Strategi Politik Identitas Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi tentang Kemenangan Ade Kartika di Daerah Pemilihan II Kabupaten Majalengka)

Alrdi Samsa

Program Pascasarjana Departemen Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada
 Jl. Bulaksumur Yogyakarta, Indonesia Kode Pos. 55281
 alrdisamsa@gmail.com
 *Penulis Korespondensi: alrdisamsa@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	
<p>Keywords 2019 Legislative Election; Women Political Strategy; Legislative Candidate;</p>	<p>ABSTRACT This study describes the identity politics strategy of legislative candidates in the local political constellation. The focus of this study is about the victory of Ade Kartika in the electoral area II with the composition of the Districts of Kertajati, Jatitujuh, Ligung and Jatiwangi. This study aims to find out more closely related to the political strategy of candidates for legislative members by using the issue of gender identity as the main capital in the legislative political constellation in 2019. The concept of identity politics is used as an analytical tool to reveal how the identity politics strategy works in winning candidates. This study used descriptive method with a qualitative approach. Data analysis was performed using interview methods and relevant literature studies. As a result, this research shows that women's political strategy is based on aspects of group identity and gender ties.</p>
<p>Kata Kunci Pemilu Legislatif 2019; Strategi Politik Perempuan; Calon Legislatif;</p>	<p>ABSTRAK Studi ini memaparkan terkait strategi politik identitas calon anggota legislatif dalam konstelasi politik lokal. Fokus studi ini adalah tentang kemenangan Ade Kartika di daerah pemilihan II dengan komposisi Kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Ligung dan Jatiwangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan strategi politik calon anggota legislatif dengan menggunakan isu identitas gender sebagai modal utama dalam konstelasi politik legislatif tahun 2019. Konsep politik identitas digunakan sebagai alat analisis untuk mengungkap bagaimana strategi politik identitas berjalan dalam kemenangan caleg. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan studi literatur yang relevan. Hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi politik perempuan dilandaskan pada aspek identitas golongan dan ikatan gender.</p>
<p>Riwayat Artikel Pengiriman 09 Oktober 2019 Penelaahan 30 November 2020 Diterima 29 April 2020</p>	<p>Copyright ©2021 Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora) This is an open access article under the CC-BY-NC-SA license. Akses artikel terbuka dengan model CC-BY-NC-SA sebagai lisensinya.</p>



Pendahuluan

Studi ini akan menjelaskan strategi politik identitas yang digunakan oleh calon anggota legislatif (caleg) dalam konstelasi pemilihan umum (pemilu) legislatif 2019. Strategi merupakan unsur penting dan menjadi elemen pertama yang harus dilakukan guna mendorong partisipasi publik. Studi ini penting untuk diangkat untuk melihat bagaimana konstelasi politik perempuan hadir dalam arena politik lokal serta untuk melihat bagaimana caleg tersebut menggunakan strategi isu politik identitas gender sebagai salah satu faktor kemenangan.

Tidak dipungkiri, keterwakilan perempuan dalam konstelasi politik legislatif lokal sangat diperlukan kehadirannya guna mendorong partisipasi politik perempuan di daerah agar meningkat. Selain itu, representasi politik perempuan juga hadir menjadi satu elemen utama yang jika kita akan membicarakan mengenai kematangan demokrasi menjadi satu kajian yang sangat penting. Oleh karenanya politik perempuan dalam konstelasi politik lokal menjadi sangat *urgent* untuk ditelaah. Terlebih pada aspek strategi guna melihat bagaimana politik identitas bekerja dalam konstelasi politik perempuan di ranah lokal.

Perihal payung hukum, keterwakilan perempuan sudah diatur dalam UU. NO. 2 Tahun 2008 yang memuat persoalan kebijakan bahwa perempuan harus hadir minimal 30% dalam pendirian atau kepengurusan partai di tingkat pusat. Di UU No. 10 Tahun 2008 pun sudah sangat ditegaskan bahwa partai politik dapat mengikuti pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Artinya bahwa dua payung hukum tersebut sudah menjelaskan dengan gamblang betapa penting keterwakilan perempuan harus hadir dalam arena politik nasional atau pun lokal.

Pembahasan mengenai keterwakilan perempuan, sangat identik dengan kajian identitas gender, terkait hal tersebut jika kita melihat dari sudut pandang politik identitas dalam ruang lingkup definisi teoritik, politik identitas adalah hal politis yang memang bertujuan untuk mengedepankan kepentingan dari anggota satu kelompok tertentu karena memiliki kesamaan identitas ataupun karakteristik yang di dasarkan atas ras, etnisitas, *gender* atau keagamaan. Pembentukan identitas sendiri dapat terbentuk secara interaksial atau pun parsial. Sehingga terjadilah perubahan ekonomi, sosial politik dan sosial budaya sendiri. Etnis dan agama serta gender adalah elemen tersendiri bagi perebuhan sosial. Terjadinya politik identitas keagamaan akan timbul secara langsung atau pun tidak pada perubahan sosial, begitu pun sebaliknya (Sukamto, 2010).

Politik identitas juga bisa dikatakan sebagai penanda dari aktivitas politis, hal itu diutarakan Heyes ada kepentingan dari upaya untuk keluar dari situasi diskriminasi (Sari,

2016). Hal itu biasanya mencakup anggota dari beberapa kelompok yang dalam konteks Heyes termasuk di dalamnya adalah identifikasi ras dan gender. Politik identitas tidak terlepas dari sebuah gerakan politik yang titik fokus perhatiannya tertuju pada sebuah perbedaan, dimana perbedaan tersebut berlaku sebagai satu kategori politik. Politik identitas pun tidak akan muncul, jika tidak ada kesadaran individu untuk mengelaborasi konsep identitas partikular dengan identitas primordial gender, etnik dan agama.

Politik identitas pun jika ditelaah dalam beberapa sudut pandang akan menghasilkan tiga sudut pandang yang tidak sewarna. Hal ini berkaitan dengan adanya beberapa hal yang mengitari karakteristik penggunaan identitas tersebut dalam konstelasi politik tertentu. Setidaknya ada tiga pandangan teoritis yang dapat digunakan untuk melakukan kajian atas politik identitas, yakni primordialisme, konstruktivisme dan instrumentalisme. Berikut penjelasannya terkait tiga sudut pandang tersebut yang berhasil dijelaskan oleh Abdillah, Diantarnya adalah; *Pertama*, Primordialisme; Identitas sebagai *Given* argumentasi intinya adalah Argumentasi identitas politik dalam cara pandang primordialisme adalah bahwa kelompok sosial tertentu diidentikan dengan gambaran wilayah, agama, kebudayaan serta organisasi sosial sebagai satu hal yang sudah diberikan, didapatkan atau 'given' tidak bisa dibantah dan ditolak. Identitas jenis ini lebih pada sebuah karakteristik perbedaan yang mencolok diantaranya identitas etnik dan juga gender. *Kedua*, ialah Konstruktivisme; Identitas sebagai Konstruksi Sosial yang situasional yang dapat membangun dan dibangun. Pada intinya identitas konstruktivisme ini adalah identitas yang terjadi atas konstruksi sosial masyarakat terhadap fenomena politik tertentu, dan membantu untuk memberikan cara *building image* yang sedang terjadi dalam fenomena sosial tersebut. Biasanya identitas ini terikat dengan identitas agama dan ras pun etnik bisa masuk di dalamnya. *Terakhir* adalah Identitas Instrumentalisme; Identitas sebagai alat memanipulasi dan mobilisasi argumentasi dasarnya adalah bahwa Instrumentalisme ini lebih menitik-beratkan pada perhatian proses manipulasi dan mobilisasi politik. Yang dimaksud adalah manakala kelompok sosial tersebut menyusun rapih satu perjuangan aspirasi sosial atau pun terkait dengan ditempatkannya satu orang di jabatan publik tertentu dan hal itu berdasarkan atribut awal etnisitas seperti kebangsaan, agama, ras serta bahasa. Maka pada saat itu, kelompok tersebut sedang melakukan mobilisasi kepentingan mereka (Sari, 2016).

Instrumentalisme menjelaskan bahwa identitas etnik serta agama dan gender bahkan senantiasa dijadikan sebagai sarana elit untuk memanipulasi identitas tersebut demi keuntungan sendiri. Pandangan ini mengasumsikan bahwa golongan minoritas akan dijadikan sebagai alat yang sangat-sangat menguntungkan bagi kelompok mayoritas.

Studi akan lebih memaparkan mengenai strategi politik identitas yang digunakan caleg perempuan dalam pemenangan konstelasi pileg di tingkat lokal pada tahun 2019 dengan subyek penelitian utamanya yang mampu mengakomodir golongannya untuk memilihnya menjadi anggota legislatif daerah. Konteks politik lokal sengaja diambil, guna melihat keberagaman aspek strategi identitas apa yang dijalankan dalam proses pemenangan caleg. Pada intinya dominasi strategi pemenangan adalah seberapa tepat kandidat mengerti isu apa yang ada dalam lingkungan masyarakat. Peran partai politik hanya disebut sebagai fungsi rekrutment calon kandidat dan setelahnya, kandidat dibiarkan dan tidak terlalu dibantu dalam proses kampanye. Sehingga caleg haruslah mengerti watak, karakter serta tatanan masyarakat yang ada di dapilnya (Prasetya et.al, 2016)

Berangkat dari hal tersebut studi ini mengurai lebih dalam mengenai strategi politik identitas gender yang dijalankan guna meraih kemenangan sebagai anggota DPRD. Fokus penelitian ini ada pada sosok Ade Kartika, yang berhasil memenangkan suara di dapil II (Kecamatan Kertajati, Ligung, Jatiwangi dan Jatitujuh) dengan perolehan 1.470 suara. Keberhasilannya tidak lepas dari sosoknya sendiri. Ade Kartika yang awalnya hanya ibu rumah tangga, dan membantu bisnis wiraswasta suaminya, tertarik terjun dalam dunia politik pada tahun 2013, dan hingga hari ini merupakan kader aktif partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan satu-satunya perwakilan perempuan bagi Nasdem di DPRD Majalengka. Berikut ini adalah perolehan suara, dan jumlah kursi perempuan di DPRD Kab. Majalengka;

Tabel 1. Daftar Anggota Legislatif Perempuan 2019-2024 di Kabupaten Majalengka

Nama Anggota Legislatif	Partai Pengusung	Jumlah Suara
Ika Purnama Alam	PKS	3.176
Rina Sri Isdiyanti	PDIP	5.749
Tantri Dwiyantri	PDIP	5.217
Herni Mardiana	Golkar	4.545
Ade Kartika	Nasdem	1.470
Firda Hidayat	PDIP	6.857
Yayah Qomariyah	PKS	3.741
Dhora Darojatin	PKS	3.741

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dari data tabel tersebut, sudah terlihat bahwa perempuan di Kabupaten Majalengka, dari 50 kursi yang tersedia hanya 8 kursi yang di isi oleh perempuan di Kabupaten Majalengka. Pun dengan beragam partai yang hadir, Nasdem hanya bisa menempatkan satu-satunya wakil perempuan di legislatif daerah, yaitu Ade Kartika. Meski pun jumlah suara yang memang jika dibandingkan dengan perolehan calon legislatif perempuan lainnya cenderung sedikit, Ade Kartika bagaimana pun telah berhasil masuk dengan menggunakan isu identitas gender di dapilnya. Selain itu, lahir dari keturunan keluarga yang cukup dikenal serta suaminya sendiri yang pernah menjabat Kepala Desa di Kertajati, memiliki pengaruh

elektabilitas bagi Ade untuk memperoleh kemenangan serta kedekatannya dengan ibu PKK juga membawanya menjadi Ketua PKK di Desa Kertajati. Oleh karenanya, dari beberapa hal tersebut maka perlu kiranya studi ini memaparkan rincian strategi politik yang dilakukan oleh Ade Kartika yang juga adalah seorang pengusaha, yang berhasil mengakomodir golongannya –ibu PKK dan pemilih perempuan lainnya– untuk memilihnya menjadi anggota legislatif daerah dalam konstelasi pileg 2019 ditingkat lokal. Maka berdasarkan fakta tersebut studi ini akan coba menelaah lebih dalam terkait; *bagaimana strategi politik identitas menjadi faktor kemenangan Ade Kartika menjadi anggota legislatif di Kabupaten Majalengka?*

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, partisipasi perempuan dalam politik adalah satu analisis yang sangat penting di Indonesia. Telah banyak studi yang mengupas terkait hal tersebut. Kebijakan yang bersifat afirmatif tentang kuota 30% pada perempuan di parlemen, memang tidak dipungkiri merupakan hal yang sangat positif. Hal itu menjadikan perempuan terdorong untuk masuk dalam konstelasi politik. Namun identitas politik di Indonesia yang sangat lekat dengan laki-laki, membuat perempuan sedikit tidak mudah untuk di dorong maju. Ada satu ideologi ibuisme yang mempengaruhi pola pikir perempuan dimana perempuan sangat identik diperlakukan keras, dan menjadikan potensi politik perempuan tumpul (Sundari & Annisa, 2014). Atas dasar adanya persepsi tersebut, kemudian perempuan menggunakan satu identitas gender untuk memperjuangkan haknya yang memang dalam mata hukum serta seharusnya di mata masyarakat sama-sama memiliki hak untuk berpolitik.

Penelitian terdahulu telah mengurai beberapa beberapa latar belakang dan motivasi yang menjadikan politisi perempuan akhirnya berkenan untuk maju sebagai caleg. *Pertama*, rendahnya keterwakilan perempuan di dunia politik. *Kedua*, karena ingin mengabdikan pada masyarakat. *Ketiga*, karena ada dukungan dari keluarga dan terakhir adalah karena adanya pembelakuan kuota 30% perempuan dalam dunia politik (Alam & Ilham, 2016). Penelitian ini pun akhirnya membenarkan bahwa politisi perempuan memang merasa sangat memiliki kepentingan untuk memenuhi persoalan representasi politik di legislatif. Akhirnya persoalan tersebut dijadikan motivasi yang kuat agar perempuan aktif dalam konstelasi politik, bahkan ditingkat lokal sekali pun.

Studi sebelumnya memang mengurai sangat mendalam tentang alasan perempuan harus hadir dalam percaturan politik, diantaranya adalah bahwa elit partai politik ada beberapa yang masih resisten tentang kebijakan yang telah berlaku. Penelitian selanjutnya mengurai permasalahan pelik yang terjadi dalam lingkup partai politik. Faktanya bahwa parpol sangat kesulitan mencari kader perempuan yang menurut mereka kapabel. Satu sisi

perempuan dihadapkan dengan keadaan yang menjadi kendala di internal yakni partai, pun dengan keadaan eksternal yang tidak mendukung perempuan yakni persepsi masyarakat. Akhirnya perempuan harus kembali berjaung dalam lingkup internal dan eksternal guna menghadirkan perannya dalam kancah politik (Wardani, 2013). Studi yang mengonfirmasi tersebut dengan membahas strategi gender di tiga partai politik dengan perolehan suara terbesar pada periode 2009-2014, yakni partai demokrat, Golkar dan PDIP telah membawa pada temuan yang mengejutkan. Nyatanya, partai politik tidak menunjukkan ketentuan yang menyangkut bagaimana kebijakan dan strategi politik dalam mewujudkan keadilan gender. Ini menandakan bahwa partai politik absen dalam peningkatan representasi perempuan atas kesetaraan, keadilan dan ekuitas gender. (Adelina, Shelly & Soetjipto, 2014).

Tetapi, partai politik bagaimanapun berusaha untuk menunjang ketercapaiannya dalam keterwakilan perempuan di pentas konstelasi politik sebanyak 30%. Partai politik, terus melakukan kaderisasi politisi perempuan agar saat terjadi pemilihan umum angka tersebut telah tercapai. Partai yang dikategorikan sebagai penunjang utama strategi pemenangan calon kandidat perempuan di beberapa daerah. Tentunya akan melakukan strategi politik pencitraan yang sangat kentara agar mampu meraup suara konstituennya. Satu studi menemukan fakta bahwa, partai Golkar yang menjadi fokus penelitian telah mengonfirmasi hal tersebut, dimana meskipun identik dengan partai yang nasionalis, partai Golkar mampu untuk mencitrakan diri sebagai partai yang religius. (Nasution & Fauzan, 2017). Hal itu akan berkorelasi positif dengan caleg perempuan yang diusung, dimana jika satu daerah kemudian lebih religius masyarakatnya, maka citra yang akan dibangun oleh politisi perempuan tersebut akan sangat menjadi orang yang religius.

Aspek citra partai dan caleg yang menyesuaikan kedaerahan merupakan salah satu fakta identitas yang digunakan dalam strategi politik. Jika kita melihat lebih dalam pada studi tersebut, maka sebenarnya politik identitas sedang berlangsung dengan pembungkusan citra partai dan juga citra caleg yang diusung oleh partai tersebut. Hal itu lumrah, dan bisa di toleransi ketika identitas menjadi satu penunjang utama untuk meraup suara masyarakat.

Perlu digarisbawahi bahwa, peran perempuan cukup vital dalam mengelola dan mengakomodir suara masyarakat, terlebih suara perempuan. Salah satu studi yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan peran vital perempuan dalam mengakomodir aspirasi masyarakat adalah berdasarkan kemampuan perempuan, ada daya serap perempuan di bidang legislatif. Terlepas dari hambatan struktural dan budaya patriarki yang masih hadir dalam proses perwakilan perempuan tersebut (Ardi, 2014). Oleh karenanya partisipasi perempuan dalam konstelasi politik sangat penting, guna mendorong upaya pengembangan masyarakat.

Termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan perempuan. Apabila tingkat partisipasi perempuan tinggi maka tingkat demokrasi pun dalam satu negara akan mengalami peningkatan, pun dengan sebaliknya apabila tingkat partisipasi perempuan rendah, maka akan mengalami kemunduran demokrasi (Mukarom, 2012)

Lain lagi dengan partisipasi perempuan yang ada di Kendal, bahwa perempuan dalam politik memang hadir sebagai bentuk emansipasi bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. Hasil penelitiannya memberikan fakta bahwa partisipasi perempuan di lembaga legislatif sangat rendah, ditinjau dari kuantitas. Hal itu tidak setara dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibanding laki-laki. Partisipasi yang rendah ini mengakibatkan terhambatnya perempuan untuk berpartisipasi dalam lembaga legislatif (Adhi Suciptaningsih, 2010)

Studi yang cukup menarik, membahas mengenai tujuh aktivis organisasi masyarakat sipil perempuan dalam pemilihan umum 2004 dan 2009. Hasilnya menyatakan bahwa pengalaman aktivis perempuan organik, perempuan mampu berkontribusi mengimplementasikan keterwakilan perempuan dalam partai politik dan dalam ruang parlemen. (Perdana, 2014). Jumlah kandidat legislatif pada DPR RI 2013, sangat membutuhkan perhatian yang serius dari partai politik. Pemilu 2014 telah menjadi pembuktian bahwa partai politik hanyalah menjadikan perempuan sebagai syarat untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada kebijakan internal partai dalam menunjang kepemimpinan perempuan. Dan yang terpenting transformasi kebijakan internal partai tersebut haruslah dijalankan guna terjadi perubahan budaya struktural ramah gender (Haryono, 2014)

Dari beragam studi tersebut, nyatanya beberapa studi terkait dengan perempuan dan konstelasi politik hanya menyangkut permasalahan tentang strategi partai politik untuk mewujudkan kesetaraan gender, dan juga lebih kepada permasalahan representasi perempuan. Studi ini cukup berbeda, dengan mengangkat identitas sebagai pokok utama pembahasannya disertai dengan analisis bagaimana caleg ditingkat lokal berhasil memenangkan perolehan suaranya melalui strategi politik identitas gender.

Metode

Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan utama penggunaan metode deskriptif adalah karena metode ini merupakan salah satu metode dengan telaah lebih dalam tentang pemahaman fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, baik dari perspektif perilaku, persepsi, motivasi atau pun tindakan secara holistik

dengan mendeskripsikannya melalui kata-kata dan bahasa (Moleong, 2012). Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk membuat satu gambaran bersifat deskriptif dengan mengungkap kenyataan politik perempuan dalam konstelasi lokal pemilu legislatif 2019. Penelitian ini mengambil fokus studi pada sosok Ade Kartika karena dapat menjadi salah satu contoh penting dalam aktor politik lokal yang berhasil mengakomodir golongan “perempuan” untuk memihak padanya. Hal ini tentunya menjadi salah satu warna dalam pentas politik lokal, serta Ade Kartika pun dapat menjadi gambaran penting untuk menganalisis penggunaan identitas gender sebagai faktor kemenangan.

Pengumpulan data untuk mengungkap hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara sebagai bentuk data primer. Penelitian ini pun dilakukan di dapil II Kabupaten Majalengka. Informan penelitian dalam studi ini diantaranya adalah; Ade Kartika sebagai calon anggota legislatif yang berhasil duduk di kursi DPRD Kabupaten Majalengka, Koordinator Umum tim sukses Ade Kartika dan Koordinator Daerah Kecamatan Kertajati serta Ketua Tim pemenangan Ade Kartika. Sementara untuk data sekunder, penelitian ini merujuk pada pengumpulan dan penggalian studi literatur yang relevan guna menyeimbangkan pengolahan data dari data primer dan sekunder. Maka proses analisis akan lebih mudah dilakukan, Sementara terkait keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Teknik pengumpulan data akan menggabungkan beberapa data dari teknik pengumpulan data dan sumber yang telah tertera (Sugiyono, 2013). Artinya bahwa dalam tahap triangulasi teknik penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi untuk sumber data serta telaah pada hasil observasi lapangan. Sedangkan untuk teknik triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan penggalian data pada sumber yang berbeda-beda, namun dengan teknik yang sama seperti wawancara. Maka dari itu, penelitian ini mengurai pembahasan dengan dasar penggalian dari beberapa informan penelitian yang berbeda.

Hasil dan Pembahasan

Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai Langkah Awal Pembentukan Identitas

Sebagai seorang tokoh masyarakat serta istri dari Kepala Desa Kertajati, Ade Kartika cukup dikenal di kalangan masyarakat. Terlebih dirinya menjabat sebagai Ketua Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), hal itu tentunya menambah mudah langkahnya untuk maju sebagai calon anggota legislatif daerah di dapil II Kabupaten Majalengka. Tentunya, hal itu pun tidak disia-sikan oleh Ade Kartika, dirinya yang aktif juga

di organisasi Karang Taruna Desa serta Pengurus Remaja Masjid Wanita turut secara terbuka memaparkan bahwa dirinya akan terlibat langsung dalam konstelasi politik elektoral. Hal tersebut disampaikan secara terbuka oleh Ade Kartika dalam wawancaranya (3 Juni 2019).

Pemaparan tersebut juga diiringi dengan janji politik awalnya yang memang sudah terkesan sangat membawa pesan feminis. Dimana dirinya berjanji untuk menjadi perempuan yang membawa aspirasi masyarakat terutama di dapilnya sendiri. Penuturan tersebut tidak berakhir hanya dalam forum kegiatan perkumpulan ibu-ibu PKK, organisasi remaja masjid dan juga komunitas perempuan berdaya saja. Namun lebih dari itu, ternyata dengan jejaring suaminya yang juga merupakan pemilik PT. Adi Karya Kertajati, dirinya membuka celah untuk memperkenalkan diri pada ibu-ibu PKK dan komunitas perempuan lainnya di daerah Jatiwangi, Ligung dan juga Jatitujuh. Langkah politik itu tentunya bukan muncul tanpa alasan, setiap pemilihan legislatif fakta yang terjadi adalah perwakilan di kursi DPRD Kabupaten Majalengka sangat rendah, oleh karenanya isu yang terus dikembangkan pada setiap konstituennya adalah terkait persoalan gender. Berikut data hasil pemilu legislatif DPRD Kabupaten Majalengka dari tahun 2004 sampai 2014, dimana keterwakilan perempuan hanya dapat diisi oleh beberapa partai saja, tidak semua partai dapat mewakilkan calon perempuannya di ranag legislatif lokal;

Tabel. 2 Komposisi Keanggotaan DPRD Kab. Majalengka Hasil Pemilu 2004-2014

Fraksi	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Majalengka					
	2004		2009		2014	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
PPP	6	-	4	-	4	-
Golkar	10	1	6	-	5	-
PDIP	10	1	6	4	14	4
Demokrat	-	-	3	1	4	-
PKB	3	-	6	-	6	-
PAN	5	-	5	-	3	-
PBB	-	-	1	-	-	-
PKP Indonesia	1	-	1	-	-	-
PKS	4	1	4	1	4	-
Hanura	-	-	1	1	-	-
Gerindra	-	-	1	-	3	2
PATRIOT	3	-	3	-	-	-
PKPB	-	-	1	-	-	-
PKNU	-	-	1	-	-	-
Nasdem	6	-	4	-	-	1
Jumlah Suara	42	3	43	7	43	7

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Majalengka

Dari tabel tersebut, mengacu pada tiga kali pemilihan tersebut, jumlah suara yang hanya diwakilkan hanya sedikit. Dimana tahun 2004, perwakilan perempuan di kursi legislatif hanya 3 orang. Memang ada kenaikan, namun tidak terlalu signifikan tahun 2008 dan 2014 ada 7 orang, dan itu pun tetap yang mendominasi calon perempuan berasal dari satu partai yakni PDIP. Tentunya hal ini yang mendorong Ade Kartika melancarkan isu gender

dalam strategi politiknya. Dapil II yang tergolong dengan salah satu dapil yang jumlah penduduk perempuannya cukup untuk mendorong Ade maju sebagai calon legislatif sangat mengukuhkan perannya dalam isu strategis yang selalu disampaikan.

Tabel.3 Jumlah Penduduk Perempuan di Dapil II Kabupaten Majalengka

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Kertajati	20.654
Ligung	28.132
Jatitujuh	27.508
Jatiwangi	41.460

Sumber: Data BPS Kab. Majalengka

Maka dari data tersebut, tidak heran Ade Kartika menjadikan salah satu isu gender menjadi salah satu penarik utama untuk meraih konstituennya. Seperti diawal, Ade Kartika tidak jauh berbeda dalam mengambil sikap ketika melakukan kampanye di beberapa wilayah. Di setiap daerah, dirinya membawa pesan yang sama pada ibu-ibu PKK. Di dampingi dengan istri dari camat di masing-masing daerah tersebut –relasinya di dapat dari suaminya–, dirinya memaparkan akan memperjuangkan aspirasi perempuan dan juga kebijakan yang dilakukan akan bersifat feminis dan sangat menguntungkan bagi para perempuan. Intinya adalah bahwa dirinya mencitrakan diri sebagai sosok yang dapat mewakili kaum perempuan untuk dapil II di Kabupaten Majalengka. Alasan utama dirinya terfokus pada ibu-ibu PKK, atau bahkan pada komunitas perempuan di beberapa Kecamatan di dapilnya adalah karena jumlahnya memang setidaknya bisa mengantarkan Ade menuju kursi legislatif daerah. Berikut salah satu data ibu-ibu PKK di Kecamatan Kertajati;

Tabel. 4 Data PKK Kecamatan Kertajati 2018

Desa	Kelompok		Kader		
	PKK RW	PKK RT	Anggota Tetap	Umum	Khusus
Mekarjaya	7	7	31	28	7
Palasah	7	15	20	76	2
Pakubereum	4	13	22	55	3
Sukawana	9	18	16	16	8
Kertawinangun	3	16	27	14	14
Babakan	1	2	21	2	18
Kertajati	5	8	16	3	7
Kertasari	4	-	26	17	1
Mekarmulya	2	8	51	7	-
Sukamulya	2	7	10	7	7
Bantarjati	5	8	15	15	2
Pasiripis	8	10	8	8	8
Sukakerta	3	8	13	20	8
Sahbandar	-	-	28	11	-
Jumlah	120	120	304	279	88

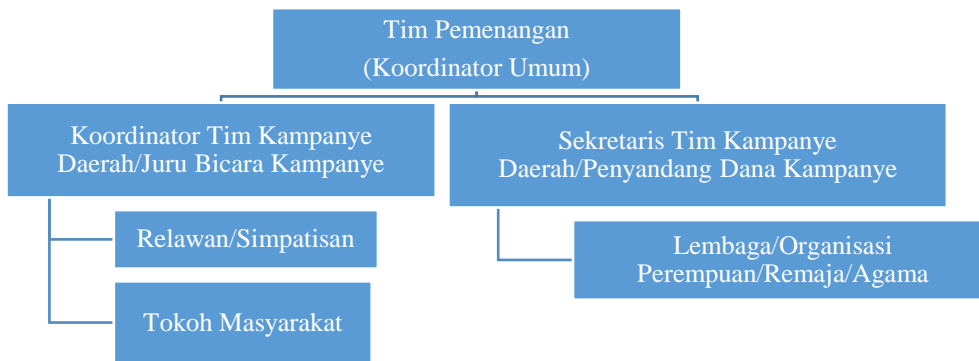
Sumber: BPS Majalengka, Kecamatan Kertajati dalam Angka 2018

Dari Tabel tersebut, memang ibu-ibu PKK tidak cukup terlalu signifikan untuk menjadi patokan caleg menuju kursi legislatifnya. Namun setidaknya jika dari satu

Kecamatan Ade Kartika mengantongi jumlah anggota tetap dan umum yang ada di Kecamatan lainnya. Suara yang kemudian terakumulasikan akan mampu untuk membawanya masuk menjadi anggota legislatif daerah. Oleh karenanya identitas gender akan sangat berguna untuk meraih simpati dari kaum wanita. Ade pun menuturkan bahwa strategi politik yang dilakukan adalah merangkul masyarakat meelalui para tokoh agama, ibu-ibu pengajian dan juga para perangkat desa juga dilakukan pola pendekatan agar pesan yang menjadi inti pentingnya mampu untuk tersampaikan. Dirinya mengaku memiliki program unggulan yang ditawarkan yakni Peka (Perempuan Kepala Keluarga) dimana janda-janda akan diberdayakan melalui saluran bantuan modal awal untuk bekerja dan mencari nafkah, baik menjadi pedagang makanan, toko kelontongan atau pun hal lainnya. Dirinya melihat segi identitas minoritas inilah yang perlu diangkat dan dibantu. Hingga akhirnya pembentukan citra diri sebagai orang yang mampu mengakomodir golongan perempuan terbentuk. Akhirnya inilah yang menjadi bekal utama dimana tim sukses akan menyampaikan ide serta gagasan terkait dengan isu identitas gender yang dilakukannya.

Tim Sukses sebagai Ujung Tombak Pembentukan Isu Politik Identitas Gender

Instrumen pemenangan dalam pertarungan legislatif ataupun eksekutif tidak akan lepas dari hadirnya tim sukses. Hal ini sangat penting dalam pemenangan kandidat dalam setiap pemenangan pemilu. Oleh karenanya Ade pun membentuk tim sukses. Atas dasar azas kekeluargaan, maka tim sukses terbentuk. Koordinator utama tidak lepas dari keluarganya sendiri. Hal ini guna mengantisipasi terjadinya ketidaksesuaian target yang diharapkan oleh Ade Kartika dalam dinamika perebutan suara dalam pemilihan legislatif daerah. Struktur tim pemenangan pun terbentuk dengan lengkap, diantaranya adalah; Juru Kampanye, Penyandang Dana Kampanye dan Koordinator Tim Sukses. Tiga stuktur penting inilah yang kemudian Ade gunakan sebagai alat kelengkapan perangkat kampanye. Pembentukan Tim Sukses pun tidak serta merta Ade Kartika yang membentuk. Koordinator Umum Tim Sukses A.B (dengan nama samaran) membentangkan stuktur yang hadir dalam pola tim, dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan data wilayah daerah pemilihan, berikut bagan pemenangan yang dibentuk oleh tim sukses:



Bagan 1. Struktur Tim Kampanye Ade Kartika
Sumber: Diolah dari hasil wawancara

Bagan tersebut setidaknya telah menjelaskan bagaimana fungsi koordinasi dan juga pembagian tugas yang disajikan oleh Koordinator Umum tim sukses Ade Kartika. Dimana Koordinator Umum bertanggung jawab atas Koordinator Daerah yang terdiri dari beragam kecamatan dapil II. Koordinator daerah terdiri dari beberapa simpatisan, tokoh masyarakat dan ulama atau tokoh agama. Koordinator daerah bertanggung jawab atas pengelolaan suara yang dilaporkan oleh koordinator desa di setiap kecamatan tersebut. Awal langkah gerak tim suksesnya ini adalah dengan cara menyampaikan isu apa yang dibawa oleh kandidat, dan setelah adanya proses berkumpul bersama seluruh jabatan tim sukses. Juru bicara kampanye akan dengan senang hati memaparkan apa yang akan Ade Kartika laksanakan. Terlebih setiap satu minggu sekali, koordinasi dilakukan untuk memantau pergerakan suara yang hadir, dan hasilnya menurut koordinator umum tim suksesnya menunjukkan angka yang positif setiap minggunya. Dimana gagasan yang dibawa oleh Ade Kartika sangat mudah dihapal oleh masyarakat dan juga popularitasnya semakin melambung masing-masing kecamatan dapil II.



Gambar 1. Kegiatan Kampanye Ade Kartika dengan Ibu-ibu sebagai Target Suara
Sumber: dokumentasi pribadi

Gambar tersebut merupakan penjelasan tentang penyampaian isu dan program kerja oleh juru kampanye kepada masyarakat khususnya ibu-ibu dalam kegiatan tersebut untuk

memilih dan memenangkan Ade Kartika. Perlu dicatat bahwa setiap elemen relawan, simpatisan dan juga para tokoh agama serta masyarakat tidak dibayar bahkan disebut tidak ada kompensasi yang dilakukan oleh Ade Kartika. Namun nampaknya hal tersebut berbenturan dengan penyampaian Koordinator Umum tim sukses, saat ditemui dan kemudian digalih terkait dengan hal tersebut (5 Juni, 2019). Kenyataannya bahwa ada pembayaran kompensasi dan juga tanggung jawab materi yang dihadirkan oleh Ade Kartika.

Strategi Politik Identitas Gender Ade Kartika

Jika ditarik secara umum, latar belakang Ade Kartika hadir sebagai calon DPRD Kabupaten Majalengka di dapil II adalah karena adanya interaksi politik. Interaksi politik tersebut dihadirkan oleh suaminya tersendiri. Maka hal tersebut akhirnya menjadi dasar mengapa Ade Kartika maju sebagai bakal calon legislatif. Kepiawaiannya dalam melakukan komunikasi kultural pada masyarakat juga menjadi salah satu bekalnya untuk maju dalam kontestasi DPRD Kabupaten Majalengka. Terlebih yang menjadi bekal utama adalah nama baiknya sebagai tokoh masyarakat dan istri dari pejabat perangkat desa dirawat dengan terus menerus melakukan investasi sosial berlandaskan dengan program yang mengacu pada persoalan gender. Investasi sosial tersebut berbentuk dengan ikut serta dalam program ibu-ibu, remaja masjid dan juga disetiap pertemuan RT/RW di Kecamatan Kertajati. Adapun perangkat tambahan dalam merawat ketokohan adalah ketika Ade Kartika, ikut terjun langsung dalam setiap kegiatan yang ada. Bahkan Ade Kartika ikut menjadi salah satu orang yang berhasil untuk mempromosikan makanan khas yang dibuat oleh ibu-ibu PKK. Hal itu tentunya tetap mengukuhkan diri Ade sendiri menjadi salah satu orang yang konsen dalam persoalan identitas gender. Perihal jabatannya sebagai ketua PKK, bingkai kepercayaan kelembagaan juga hadir. Dimana ibu-ibu PKK tanpa adanya mobilisasi melakukan koordinasi dengan ibu-ibu PKK lainnya yakni Kecamatan Ligung, Jatitujuh dan Jatiwangi yang merupakan daerah pemilihan Ade Kartika. Akhirnya suara ibu-ibu PKK yang notabene-nya adalah lembaga perangkat desa dapat memilih Ade Kartika.

Program gender, yakni pemberdayaan janda, serta ibu-ibu berprestasi merupakan program jaminan dan tawaran baginya. Hal tersebut tentunya mengonfirmasi bahwa ide dan kreativitas Ade untuk menghadirkan kesesuaian keinginan masyarakat. Target sasaran pun, Ade Kartika gambarkan bahwa ibu-ibu dan para janda serta anak muda yang menjadi prioritas utamanya. Prioritas utama yang berkaitan dengan gender inilah yang membentuk bingkai ketokohnya sebagai orang yang berpengaruh di dapilnya.

Koordinator umum tim sukses Ade Kartika dalam wawancara (5 Juni 2019) menuturkan bahwa yang menjadi target masyarakat adalah para ibu-ibu dan juga perempuan. Dalam tinjauan ekonomi juga masyarakat ekonomi kebawah lebih dilirik sebagai target yang harus dipegang suaranya oleh Ade kartika. Untuk memahami karakteristik dari setiap wilayah, Ade Kartika membangun hubungan emosional dengan dasar kesesuaian dan keinginan konstituen. Diantaranya adalah dengan adanya kegiatan masak bersama, dan juga adanya kegiatan sosialisasi pemberdayaan perempuan. Akhirnya sisi emosional konstituen tersentuh dan dapat menjatuhkan pilihan politik padanya, Jika ditelaah lebih dalam strategi politik perempuan yang dilakukan oleh Ade Kartika, dengan melakukan pendekatan kultural pada setiap komunitas, organisasi perempuan di beberapa daerah tersebut menjadi faktor kuat bagaimana Ade Kartika bisa memenangkan suara konstituennya. Tanpa disadari, hal itu membentuk ikatan emosional pemilih Ade Kartika yang erat, hingga akhirnya para ibu-ibu PKK pun mengajak ibu PKK di kecamatan lain untuk dengan sendirinya membantu proses kemenangan Ade Kartika. Identitas ini masuk dalam kerangka instrumentalisme dimana identitas etnik, agama serta gender dijadikan sebagai sarana dan janji politik elit untuk memanipulasi identitas demi keuntungan sendiri – dalam studi ini konteksnya adalah meraih kemenangan elektoral–. Identitas model ini akan membawa golongan minoritas –dalam studi ini adalah perempuan– hanya dijadikan sebagai alat yang sangat menguntungkan bagi calon kandidat atau kelompok mayoritas –memiliki sumberdaya–.

Selain hal tersebut, politik identitas yang dijalankan oleh Ade Kartika adalah bentuk dari strateginya untuk masuk dalam ranah bahwa identitas bersifat primordialisme. Dimana ikatan perilaku pemilih masih berdasarkan atas status sosial, gender, kesukuan dan hal lainnya yang pada intinya bentuk identitas yang sudah diterima dari lahir. Intinya disini adalah Ade Kartika memperjuangkan untuk memberikan pencapaian kolektif bersama dimana kepentingan umum –dalam studi ini spesifik pada perempuan– dan akhirnya kepentingan tersebut harus diajukan dan dicapai dengan diperjuangkan bersama-sama. Akhirnya identitas kolektif berbasis gender akan mengartikulasikan pandangannya di masa lalu dan sekarang dan hal itulah yang digunakan oleh Ade dengan menekan politik identitas ‘perempuan’ dalam percaturan politik lokal di Kabupaten Majalengka.

Kesimpulan

Penggunaan isu politik identitas berbasis gender –dalam hal ini perempuan– adalah strategi politik yang mutlak dilakukan dengan mengakomodir beberapa isu gender yang menjadi pilihan utamanya dan akhirnya dirinya sendiri menawarkan program yang dapat

merangkul diantaranya Program Peka. Hal itu mengakibatkan setiap anggota di lembaga atau organisasi tertentu bergerak sendiri ke daerah lain dan akhirnya menawarkan program gender yang telah Ade Kartika tawarkan.

Karakteristik masyarakat di dapil II yang masih memilih berdasarkan ikatan primordialisme –memilih berdasarkan gender dan ikatan emosional– pada calon yang istilahnya memang sudah terpandang. Membuat pilihan politik begitu sudah terbuka luas, dan ini pun mempermudah langkah Ade Kartika menjadi anggota legislatif daerah di Kabupaten Majalengka. Kemenangan yang diraih melalui identitas politik perempuan yang dilakukan oleh Ade Kartika memang bisa terjadi karena adanya solidaritas kuat Tim Sukses yang menyusun ide dan isu. Seperti yang dilakukan oleh Koordinator Umum Tim Sukses Ade Kartika yang terlebih dahulu melakukan pembahasan mengenai ide yang akan di sampaikan, dan ide tersebut tidak lain berkuat permasalahan keterwakilan gender, akhirnya yang terjadi dalam metode *door to door* yang dilakukan oleh koordinator daerah membawa pada pesan dan isu yang sama dan terjaga serta tertanam di kalangan masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kepada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tempat studi penulis, serta seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian karya tulis ini.

Daftar Pustaka

- Adelina, Shelly & Soetjipto, A. (2014). Shelly Adelina & Ani Soetjipto. *Jurnal Perempuan*, Vol. 19 No, 103=115.
- Adhi Suciptaningsih, O. (2010). Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif DI Kabupaten Kendal. *JURNAL KOMUNITAS, Komunitas*.
- Alam, M., & Ilham, L. (2016). Strategi Pemenangan Anggota Legislatif Perempuan Terpilih dalam Pemilihan Legislatif 2014 (Studi Pada Kantor DPRD Makassar). *Jurnal Tomalebbi; Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(4), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.01.043>
- Ardi, A. M. (2014). Perempuan Di Legislatif: Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur. *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3 No., 303–318.
- Haryono, E. A. D. (2014). Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014? *Jurnal Perempuan*, Vol. 19 No, 153–160.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mukarom, Z. (2012). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator*, 9.
- Nasution, & Fauzan. (2017). Strategi Pemenangan Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Mandailing Natal. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 60–74.
- Perdana, A. (2014). Wajah Aktivis Perempuan dalam Parlemen: Prestasi & Rekomendasi Politik. *Jurnal Perempuan*, Vol. 19 No.
- Prasetya et.al. (2016). Strategi Pemenangan Calon Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Melalui Jaringan Cekian Di Bali. *E-Jurnal Politika*, 1(Strategi Pemenangan Politik), 1–15. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/22196%3E>.
- Sari, E. (2016). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. *Jurnal Kritis*, Vol. 2 No.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukamto. (2010). Politik Identitas (Suatu Kajian Awal dalam Kerangka dan interaksi “Lokalitas dan Globalisasi”). *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2.
- Sundari, A., & Annisa, R. (2014). Politik Berbasis Komunitas: Pemberdayaan Perempuan Pemimpin di Yogyakarta. *Jurnal Perempuan*, 145–151.
- Wardani, S. B. E. (2013). *Potret Keterwakilan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009*. Jakarta: Puskapol FISIP UI.